

Jokowi Jalani Suntik Vaksin Booster Kedua Covid-19

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima vaksinasi covid-19 penguat atau booster kedua, Kamis (24/11) di Istana Kepresidenan, Bogor.

"Hari ini saya baru saja divaksinasi booster penguat," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (24/11).

Jokowi pun mengajak masyarakat khususnya lansia dan tenaga kesehatan agar melakukan vaksinasi booster. Dirinya mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster khususnya dosis pertama.

"Karena sampe hari ini kita untuk dosis 1 telah menyuntikkan 205 juta dosis, kemudian dosis yang kedua 172 juta dosis. Dan untuk vaksin booster untuk yang pertama telah disuntikkan 66 juta dosis dan untuk booster yang kedua memang masih kecil sekali masih 730 ribu dosis vaksin," ungkapnya.

Jokowi menjelaskan bahwa pentingnya vaksinasi booster bagi masyarakat karena dapat mencegah penularan covid-19. Dan juga vaksinasi booster saat ini sudah menggunakan vaksin

produksi dalam negeri.

"Kenapa kita memerlukan booster? Agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penularan covid dari orang ke orang. Ini yang paling penting. Kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini yaitu vaksin indovac, produk 100 persen dalam negeri," jelasnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, mulai November 2022, pemberian vaksinasi Covid-19 dosis booster ke-2 bagi lansia (usia 60 tahun ke atas) dimulai.

Dan Vaksin untuk dosis booster ke-2 ini telah mendapat Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM serta memperhatikan vaksin yang ada.

Pemberian vaksinasi Covid-19 dosis booster ke-2 tersebut diberikan dengan interval 6 (enam) bulan sejak vaksinasi dosis booster ke-1.

Lalu, vaksinasi Covid-19 dosis booster ke-2 bagi lansia dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di pos pelayanan vaksinasi Covid-19. ● han

Hoaks Merajalela di Medsos, Wapres: Saring Dulu, Baru Sharing

JAKARTA (IM) - Masyarakat diharapkan bisa menyaring terlebih dahulu baru sharing informasi. Mengingat, saat ini marak hoaks atau berita bohong yang beredar terutama di media sosial (medsos).

"Apalagi sekarang banyak hoaks-hoaks, betul ya? Banyak-banyak tipuan, banyak kebohongan, bahkan yang benar pun bisa dibalik jadi tidak benar. Namanya disrupsi, jadi disrupsi," ungkap Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat menghadiri peringatan Maulid Pondok Pesantren Al-Jauhari, Kp. Sangojar, Ds. Sindanggalih, Karangtengah, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (24/11).

Saat ini, kata dia, adalah eranya menyamakan kebenaran dengan kebatilan. "Namanya itu sekarang itu sudah eranya menyamakan kebenaran dengan kebatilan. Saya menyebutnya itu sebagai antara benar dan salah kadang-kadang orang bingung."

"Makanya Nabi mengajar kita doa, allahumma arinal haqqa, haqqa, perlihatkan kepada kami yang benar

kelihatan benar, dan berikan kemampuan untuk mengikuti yang benar, wa arinal batila, batila, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya, dan jangan kami jadikan ilibas, terserupakan. Janganlah engkau terserupakan, antara yang batil, kemudian kita menjadi sesat," katanya.

Wapres lalu mengingatkan agar informasi-informasi yang beredar harus bisa disaring terlebih dahulu.

"Karena itu kalau kita mendengar berita jangan langsung diterima. Bahasa agamanya di tabayyun dulu, di cek dulu benar apa tidak. Bahasa sekarang itu, jangan sharing tapi di saring lebih dulu. Saring dulu baru sharing, kalau benar itu baik."

Dirinya pun mengajak agar dakwah-dakwah sekarang bisa dilakukan secara digital.

"Bukan Mujahid dakwah (saja), tapi juga Mujahid dakwah yang bisa berdakwah melalui digital, digitalisasi dakwah itu harus kita lakukan karena alam nya seperti itu sekarang dan medannya seperti itu," kata Maruf. ● han



FOTO: ANT

PERINGATAN HARI MENANAM POHON
General Manager Operation east Region Pertamina Gas Hendra Nasution (tengah) bersama siswa sekolah dasar mengumpulkan sampah pantai saat peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di Pantai Rembat, Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (24/11). PT Pertamina Gas menanam 3.000 bibit pohon di sekitar pantai yang rusak akibat abrasi sebagai bentuk pemulihan ekosistem kawasan pesisir.

Aksi Korban Gempa Cianjur Minta Paksa Donasi ke Pengendara Mobil

CIANJUR (IM) - Aksi korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menghadang pengemudi mobil guna meminta paksa donasi kembali terjadi. Kali ini, aksi tersebut menimpa seorang youtuber bernama Dede Inoen.

Dalam unggahan Dede di instagram pribadinya yakni @dedeinoen terlihat salah seorang warga sekitar tengah memaksa meminta donasi kepada salah seorang relawan yang tengah menyeter mobil.

"Saya cuma minta satu atau dua, di sini juga gak mungkin diambil semua," ujar peminta donasi tersebut, dikutip Kamis (24/11).

Percekocokan pun terjadi dalam beberapa saat, hingga akhirnya salah seorang pria yang tengah berada di dalam mobil memberi pecahan uang dan kembali memacu

kendaraannya. Menanggapi hal itu, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan, pihaknya bakal kembali menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Pasti kita akan tindak tegas. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Polres, Pemd, Kodim, sehingga ke depan tidak ada masyarakat terdampak yang melakukan penghadangan atau pengambilan paksa bantuan logistik," ujar Doni saat dikonfirmasi.

Doni mengimbau, apabila terdapat lagi kejadian tersebut, ia meminta masyarakat untuk langsung melapor ke pihak yang berwajib atau ke dirinya sendiri. "Apabila ada pihak atau masyarakat yang akan mendonasikan bantuan mengalami gangguan, agar bisa menghubungi saya," ujarnya. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER PENYEMPURNAAN RRUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiarij (kedua kiri) menyampaikan paparannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11). Dalam rapat yang membahas penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut Wamenkumham menyatakan pemerintah telah mempertimbangkan untuk mengubah beberapa pasal krusial.

KPK Bakal Telusuri Aliran Dana Suap dan Gratifikasi AKBP Bambang Kayun

KPK memastikan telah punya bukti permulaan yang cukup kuat untuk menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka penerima suap.

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengembangkan data dugaan suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun yang diperoleh dari pihak Polri. Termasuk, soal aliran dana dugaan suap AKBP Bambang Kayun.

"Segala informasi dan data awal pasti kami kembangkan pada penyidikan perkara tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (24/11).

Ali mengatakan bahwa KPK telah mengantongi data dan informasi awal dari Polri soal kasus AKBP Bambang Kayun. Kasus tersebut diketahui memang merupakan limphan dari Polri.

"Mengenal materi penyidikan tentu tidak bisa kami publikasikan saat ini karena itu akan dibuka pada saanya nanti ketika tahap persidangan,"

terang Ali.

KPK memastikan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup kuat dalam menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka. Salah satunya, soal dugaan penerimaan serta aliran uang suap dan gratifikasi Bambang Kayun.

"KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu setelah sebelumnya memiliki alat bukti yang cukup. Demikian pula pada proses mekanisme penetapan tersangkanya juga kami perhatikan betul ketentuan hukum yang mengaturnya," beber Ali.

Perwira Polisi Bernama lengkap Bambang Kayun Bagus Panji Sugihato ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia).

"Benar KPK, telah memu-

lai penyidikan baru mengenai dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia)," ujar Ali

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan tersangka pihak pemberi suap merupakan pihak swasta. Namun, KPK belum membeberkan secara terang nama-nama tersangka dalam kasus ini.

Bambang Kayun pun sudah dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung mulai 4 November 2022.

Berdasarkan informasi yang didapat, Bambang Kayun diduga menerima suap dari Pasangan Suam Istri (Pasutri) Herwansyah dan Emilia Said yang merupakan buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri.

Bambang Kayun disinyalir telah menerima uang miliaran rupiah diduga mobil mewah saat menjabat sebagai Kasubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Pener-

apan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019.

Uang miliaran rupiah hingga mobil mewah tersebut

diduga berkaitan dengan suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia). ● han

SIDANG PEMBUNUHAN BRIGADIR J

JPU Ancam Panggil Paksa Dua Anggota Propam Polri yang Mangkir di Persidangan

JAKARTA (IM) - Jaksa penuntut umum (JPU) bakal memanggil paksa dua anggota Propam Polri, Radite Hernawa, dan Agus guna, untuk memberikan keterangan dalam persidangan kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J.

Langkah panggilan paksa dilakukan Radite dan Agus mangkir dari panggilan persidangan guna memberikan keterangan dalam perkara itu untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatra.

"Berikutnya saksi lain kami akan panggil secara paksa. Karena telah hubungi atasan langsung direktur penyidikan mabes siap seperti itu," ujar JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11).

Menanggapi itu, kuasa hukum Agus dan Hendra, Henry Yosodiningrat memohon kepada majelis hakim untuk dapat memanggil paksa dua saksi tersebut. Baginya, keterangan dua saksi dari unsur anggota Propam Polri itu

penting. "Kami sudah baca BAP-nya, saksi ini dikatakan saksi faktual, bukam dia tidak mengetahui apa-apa. Kemudian, keterangannya berdasarkan cerita dari penyidik ada 10 halaman, akhirnya yang bersangkutan seakan-akan sebagai ahli. Karena itu kami memandang sangat perlu untuk kami uji keterangannya," terang Henry.

Menanggapi itu, ketua majelis hakim Ahmad Suhel mempersilahkan JPU untuk memanggil paksa dua saksi itu. Ia pun menunda sidang hingga satu pekan ke depan.

"Ya tadi sudah diusulkan, pemuntut umum akan menghadirkan kedua saksi dimaksud tadi, bahkan tadi disampaikan juga akan menghadirkan secara paksa. Itu lah sebabnya kita akan dengarkan keterangan mereka pada persidangan selanjutnya," tutur Suhel.

"Untuk itu sidang akan ditetapkan kembali pada hari Kamis, 1 Desember 2022," tandas Suhel. ● mei

Menhan Prabowo Ingin Lebih Banyak Taruna TNI Belajar di ADFA dan Duntroon

KAMBOJA (IM) - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Australia The Hon Richard Marles MP. Pertemuan itu dilakukan di sela-sela pelaksanaan ADMM Plus 2022 di Kamboja, Selasa (22/11).

Dalam pertemuan ini Prabowo menyampaikan harapan kedua negara dapat terus bergabung dengan rekan-rekannya di ADFA. Ini dapat menciptakan hubungan yang jauh lebih baik antara pemimpin TNI dan ADF di masa depan," tegasnya.

Kedua negara saat ini sedang menyiapkan dokumen kerja sama dan statement of intent yang akan memberikan kerangka hukum dan administrasi yang komprehensif, untuk kemitraan pertahanan bilateral, memperkuat dan menyederhanakan kerja sama pertahanan bilateral serta menjadi sinyal penting bagi kawasan tentang komitmen kemitraan pertahanan kedua negara terhadap keamanan maupun stabilitas kawasan. ● mei

Australia, yang memberikan kesempatan bagi Taruna TNI belajar di ADFA dan Duntroon.

Saat ini ada dua taruna AKMIL yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan di RMC-Duntroon selama 18 bulan, dan memulai studinya pada 2 Februari 2022.

"Saya berharap ke depannya lebih banyak Taruna dari TNI AD, AL, dan AU yang bisa bergabung dengan rekan-rekannya di ADFA. Ini dapat menciptakan hubungan yang jauh lebih baik antara pemimpin TNI dan ADF di masa depan," tegasnya.

Kedua negara saat ini sedang menyiapkan dokumen kerja sama dan statement of intent yang akan memberikan kerangka hukum dan administrasi yang komprehensif, untuk kemitraan pertahanan bilateral, memperkuat dan menyederhanakan kerja sama pertahanan bilateral serta menjadi sinyal penting bagi kawasan tentang komitmen kemitraan pertahanan kedua negara terhadap keamanan maupun stabilitas kawasan. ● mei

Usut Kasus Gagal Ginjal Akut, Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri menyatakan telah memeriksa kepala laboratorium BPOM terkait kasus gagal ginjal akut terhadap anak-anak.

"Kemarin sudah hadir itu kepala laboratorium ya," kata Dir Tipiter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto kepada awak media, Jakarta, Kamis (24/11).

Namun, Pipit tidak mengungkap secara rinci identitas dari pihak yang akan diperiksa pada kemarin hari tersebut.

"Tidak bolehlah, kepala lab kan ada pejabatnya," ujar Pipit.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan pemilik CV Samudra Chemical berinisial E sebagai tersangka

dalam kasus gagal ginjal akut terhadap anak-anak.

Selain itu, Bareskrim Polri juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus gagal ginjal akut. Kedua korporasi tersebut yakni PT Afi Farma dan CV Samudra Chemical.

Dalam hal ini, kedua korporasi itu diduga melakukan tindak pidana memproduksi obat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Untuk PT. A selaku korporasi disangkakan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 201 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8

ayat (3) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Sementara untuk CV. SC disangkakan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Pasal 197 Jo Pasal 106 Jo Pasal 201 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 dan/atau pasal 56 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. ● mei



FOTO: ANT

DKPP TERIMA 33 ADUAN MASYARAKAT
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kiri) bersama Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait aduan penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang Utama, Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (24/11). Ketua DKPP menyatakan telah menerima 33 aduan dari masyarakat terhadap penyelenggara pemilu diantaranya ditujukan untuk Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten/kota.

PENGUMUMAN TENTANG PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (2) UUPJ tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI atau LAHANSIKAM, berkedudukan di Bandar Lampung (Perseroan) mengumumkan bahwa akan ada tambahan penyertaan modal oleh pihak lain kedalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan kepemilikan dan pengendalian dalam Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pihak yang berkeberatan atas rencana perubahan kepemilikan dan pengendalian terhadap Perseroan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kepada Direksi Perseroan, dengan alamat:

PT LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI (LAHANSIKAM)
Jl. Ratu Dibalaui No. 152 A-B,
Tanjung Senang, Tanjung Senang
Bandar Lampung
Bandar Lampung, 25 November 2022
Direksi Perseroan